**Menelaah Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya**

**Rahma Insan Madani1, Nurhidayati2**

1,2 Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

1[2114110203046@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:2114110203046@mhs.uinsaizu.ac.id) [2214110203061@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:2214110203061@mhs.uinsaizu.ac.id)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **Abstrak** |
| Article history:  Received 03 Mei 2021  Accepted10 Juni 2021  Published 31 Juli 2021 |  | ***Abstract***  *To find out the potential of cash waqf and its development model, research was conducted. this research uses the literature study method supported by previous research data. The results of this study reveal that the potential and development model of cash waqf have not been well realized. this research has the advantages of waqf, namely: Continuous reward as long as the waqf object is still being utilized even though the waqif has passed away. Continuous benefits in various types of goodness and not interrupted by the transfer of ownership. As a productive investment because cash waqf can be invested in sharia-compliant financial instruments, which can generate returns that can be used for charitable purposes.* However, the implementation of *cash waqf in Indonesia is still far from its potential. Various regulations have been established to accommodate cash waqf, but its collection and utilization have not reached the expected potential. This article discusses the current cash waqf implementation model and highlights the need for more effective mechanisms, especially for the millennial generation. This research also explores trends in philanthropy and social fund management, and provides insight into the potential of cash waqf and its growth models.*  ***Keywords:*** *Potential, Cash Waqf, Development Model*  **Abstrak**  Untuk mengetahui potensi wakaf uang dan dan model pengembangannya maka dilakukan penelitian. penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan didukung oleh data penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi dan model pengembangan wakaf uang belum terealisasi dengan baik. penelitian ini memiliki kelebihan berwakaf yaitu: Pahala yang trus menerus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si wakif sudah meninggal dunia. Terus-menerusnya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan. Sebagai investasi yang produktif karena wakaf uang dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang dapat menghasilkan imbal hasil yang dapat digunakan untuk tujuan amal. Namun implementasi wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensinya. Berbagai peraturan telah ditetapkan untuk mengakomodasi wakaf tunai, namun pengumpulan dan pemanfaatannya belum mencapai potensi yang diharapkan. Artikel ini membahas model implementasi wakaf tunai saat ini dan menyoroti perlunya mekanisme yang lebih efektif, terutama bagi generasi milenial. Penelitian ini juga mengeksplorasi tren filantropi dan pengelolaan dana sosial, serta memberikan wawasan tentang potensi wakaf uang dan model pertumbuhannya.  **Kata kunci:** Potensi, Wakaf Uang, Model Pengembangan |
| *Keywords:*  *Potencial*  *Cash Waqf*  *Development Model* |
| *Copyright © 2021 Journal of Islamic Management and Pilgrimage. All rights reserved.* |

**Pendahuluan**

Dalam pendahuluan ini, kita akan menjelajahi potensi wakaf uang serta beberapa model pengembangannya, yang didasarkan pada berbagai sumber. Wakaf (Ar: waqf = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf secara etimologi merupakan bentuk masdardari kata waqafa-yaqifu yang memiliki makna al habs (menahan) atau al-muks (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah, menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya.

Definisi wakaf menurut mazhab fiqh cukup bervariasi. Kelompok Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik waqif (orang yang mewakafkan) dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Sementara malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (sigat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif. Adapun dari komunitas mazhab Syafi’iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari’ah. Sedangkan Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, Yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Wakaf menurut peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah). Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHII). Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan yang dinamakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif dengan memberikan harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya yang diperuntukan bagi kepentingan ibadah, sosial maupun untuk kesejahteraan soaial. (Abdullah, 2017). Konsep wakaf uang ini berakar dari ajaran agama dan diyakini sebagai bentuk amal yang dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Potensi wakaf uang sangat penting dalam konteks pembangunan sosial ekonomi. Yayasan Wakaf menghimpun sumbangan dalam bentuk uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan sosial. Wakaf uang mempunyai potensi untuk memacu inovasi dan pertumbuhan di berbagai industri, menjadikannya alat penting untuk proyek konstruksi jangka panjang. Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. (Al Arif, 2010)

Pendahuluan ini didasarkan pada berbagai sumber informasi dan penelitian mengenai wakaf uang dan perkembangannya. Sumber yang digunakan meliputi literatur akademis, publikasi lembaga keuangan, penelitian organisasi sosial dan keagamaan, serta pengalaman praktis pengelolaan kas di berbagai negara. Dengan melihat sumber-sumber tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai potensi wakaf uang dan model pertumbuhannya.

This document is a template. An electronic copy that can be downloaded from the website. The easiest way to meet the writing format requirements is to use this document as a template. Then type your text into it.

The paper size must match an A4 page size, which is 210mm (8.27") wide and 297mm (11.69") long with the margins set as follows:

1. Top = 2.5 cm
2. Bottom = 2.5 cm
3. Left = 2.5 cm
4. Right = 2.5 cm

**Literature Review/Kajian Pustaka (Times New Roman, Bold, 12pt)**

Menurut al arif Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya (Al Arif, 2010). Di Indonesia wakaf tunai sudah diakomodir oleh perangkat aturan yang yang lengkap, akan tetapi sayangnya realisasi pengumpulan wakaf tunai di Indonesia masih jauh dari potensi yang diperlukan. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nasution (2012) yang meneliti wacana perkiraan potensi dan realisasi wakaf di Indonesia (Hiyanti, Indria , & Fazriah, 2020) Wakif dapat mengakses langsung produk wakaf melalui dua cara, pertama melalui website/aplikasi yang disiapkan Dewan Wakaf Indonesia. Kedua, Anda bisa melalui pasar. Pembayaran produk wakaf ini dapat dilakukan melalui OVO, LinkAja, GoPay atau Mobile Banking (Hamdan & Saifuddin, 2020)

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan didukung oleh data penelitian terdahulu. Studi literatur adalah jenis penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi literatur, peneliti membaca dan mencatat informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut, serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi literatur adalah studi pustaka dan penggunaan internet sebagai sumber informasi Penggunaan internet sebagai sumber informasi dalam studi literatur dilakukan karena internet menyediakan beragam informasi yang berkaitan dengan penelitian, serta dilengkapi dengan beragam literatur yang berasal dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai belahan dunia. Alasan peneliti menggunalakn metode penelitian studi literatur adalah untuk Memperoleh data yang lebih objektif karena peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data dan Memperoleh informasi yang luas dan mendalam mengenai topik penelitian.

**Hasil dan Pembahasan**

**Kehadiran wakaf uang di indonesia**

Munculnya inspirasi wakaf tunai/uang diperkenalkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, ekonom berasal Bangladesh, dekade ini merupakan waktu yang sempurna untuk menyebarkan perangkat wakaf guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebelum Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berlaku, pada tanggal 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yg membolehkan penggunaan wakaf tunai (wakaf tunai/waqf al nuqud). menggunakan syarat nilai pokok wakaf wajib dijamin kelestariannya (Lubis H. , 2020). Pengelolaan wakaf uang dikelola hanya sang satu dewan direksi yang melapor kepada Kementerian agama (sebagai pengawas). Organisasi lain yang terlibat pada pengelolaan wakaf uang artinya Badan Wakaf Indonesia BWI (menjadi pengelola dan pengelola dana wakaf/nazhir), Nazhir (pengelola dana wakaf) dan lembaga keuangan syariah penerima dana wakaf (LKS PWU yang ialah penerima serta penghimpun dana wakaf.) (Sulistyani, Asikin, Soegianto, & Sadono, 2020)

**Regulasi Wakaf Uang di Indonesia**

Wakaf uang merupakan fenomena baru di Indonesia. Model wakaf uang atau lebih dikenal dengan istilah wakaf tunai baru muncul pengaturannya dalam UU Wakaf. Sebelum UU Wakaf lahir belum ada pengaturan atau regulasi terkait dengan wakaf uang, pengaturan wakaf lebih tertuju pada pengaturan wakaf harta tidak bergerak khususnya tanah.

Regulasi terkait dengan wakaf uang adalah:

* 1. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 1 Ayat 5 mendefinisikan benda wakaf tidak hanya meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak secara konvensional tetapi pula mencakup benda ekonomi terkini seperti surat berharga dan hak karya intelektual. dengan pendefinisian benda wakaf seperti ini maka uang bisa dikategorikan sebagai benda wakaf karena mempunyai daya tahan lama dan nilai ekonomi. Penegasan uang sebagai benda wakaf terdapat dalam bagian keenam tentang mal wakaf Pasal 1 perihal harta benda bergerak. Pengaturan spesifik wakaf uang terdapat dalam bagian kesepuluh yang membahas wakaf benda bergerak berupa uang. Pelaksanan wakaf uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Pernyataan kehendak wakaf uang dilakukan secara tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang didesain sang forum keuangan syariah di mana wakaf uang itu dilakukan. LKS mempunyai kewajiban melaporkan wakaf uang ke menteri.

* 1. Peraturan pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan khusus terkait pengelolaan wakaf uang terdapat pada paragraf tiga mengenai benda bergerak berupa uang. Paragraf ini terdiri berasal 6 Pasal. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang keharusan wakaf uang menggunakan mata uang rupiah serta kewajiban mengkonversi ke mata uang rupiah Jika Sumbernya berasal mata uang non rupiah. Ayat 3 dan 4 Pasal ini mengariskan kewajiban wakif dalam proses mewakafkan wakaf uang. Pasal 23 – 25 mengatur tentang lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang atau disingkat LKS-PWU. Pasal 26 mengatur tentang sertifikat wakaf uang (SWU). Pasal 27 mengatur ketentuan wakaf temporer dalam wakaf uang. Pengaturan khusus wakaf uang lain terdapat dalam bagian ketiga tentang Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Pasal 37 Ayat 3 yang menggariskan PPAIW khusus wakaf uang ialah pejabat lembaga Keuangan Syariah (LKS) setingkat kepala Seksi. Ayat 4 dan 5 mengatur kemungkinan notaris menjadi PPAIW termasuk buat wakaf uang.

Pengaturan yg terkait menggunakan investasi wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tersebar pada beberapa Pasal serta Ayat. Pasal 23 menegaskan bahwa wakif bisa mewakafkan benda bergerak berupa uang harus melalui LKS yg ditunjuk oleh Menteri menjadi LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 25 poin c dan d menegaskan posisi forum keuangan syariah bukan menjadi nazhir wakaf uang akan tetapi hanya perantara dan keharusan menempatkan dana wakaf ini pada rekening wadi’ah atas nama nazhir. Pasal 48 Ayat 1 memberi wewenang kepada BWI buat membentuk peraturan yang wajib dijadikan panduan pada pengelolaan wakaf uang. dalam Ayat 2 tiga dan 4 ditegaskan investasi wakaf uang hanya bisa dilakukan melaui produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Investasi di perbankan syariah harus masuk pada program penjaminan LPS adapun investasi pada luar perbankan harus diasuransikan pada asuransi syariah.

1. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. (Hilmi, 2012)

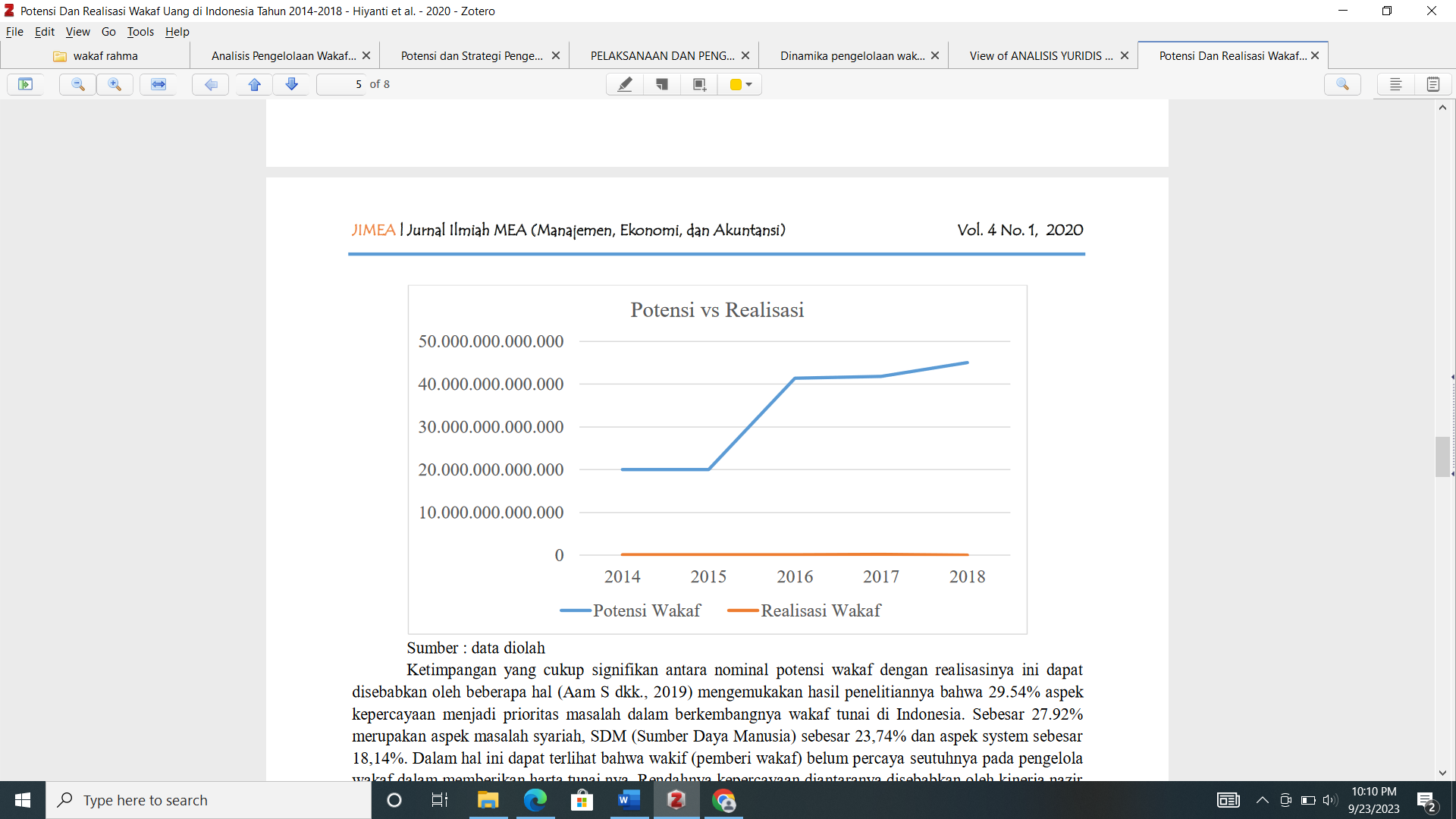
Dengan wakaf tunai/uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:

* 1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seorang yang mempunyai dana terbatas sudah mampu mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
  2. Melalu wakaf uang aset aset wakaf yang berupa tanah tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk huma pertanian;
  3. Dana wakaf uang pula bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis serta menggaji Civitas Akademika alakadarnya.
  4. pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan global pendidikan tanpa wajib tergantung di anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas. (Lubis , Mustamam, & Akhyar , 2022)

**Model pelaksanaan dari tahun ke tahun**

Di Indonesia wakaf tunai sudah diakomodir oleh perangkat aturan yang yang lengkap, akan tetapi sayangnya realisasi pengumpulan wakaf tunai di Indonesia masih jauh dari potensi yang diperlukan. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nasution (2012) yang meneliti wacana perkiraan potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Nasution (2012) memakai asumsi bahwa semua umat Muslim kelas menengah pada Indonesia telah memiliki pencerahan cukup untuk beramal, baik yang telah diwajibkan (zakat) juga yang bersifat Sunnah (infak dan wakaf). perkiraan selanjutnya, Nasution (2012) memperkirakan bahwa jumlah umat Muslim kelas menengah di Indonesia terdapat kurang lebih 10 juta jiwa, dimana penghasilan rata-rata mereka artinya Rp. 500.000-Rp. 10.000.000 per bulan, dan asumsi terakhir yang dipakai Nasution (2012) adalah bahwa rata-rata umat Muslim kelas menengah ini akan melakukan wakaf 1% asal jumlah penghasilan mereka, maka nilai sertifikat wakaf uang (SWU) yang akan dikeluarkan adalah Rp. lima.000-Rp. 100.000 dalam realisasinya, penghimpunan wakaf uang belum terdapat yang mencapai angka tersebut. menjadi contoh, lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) waktu ini baru bisa menghimpun dana wakaf sebanyak Rp. 4 Milyar terhitung dari tahun 2009.

Untuk menghitung potensi wakaf di Indonesia, para ahli menggunakan beberapa perkiraan berapa harta yang kira-kira mampu diwakafkan oleh masing-masing umat Muslim di Indonesia. Nasution (2012) menyampaikan bahwa potensi wakaf uang pada Indonesia sangat besar, apabila 20 juta muslim mewakafkan uang 1 juta per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan diperoleh sebanyak 20 trilyun. Jadi mampu disimpulkan bahwa Nasution berasumsi bahwa lebih kurang 20% rakyat Muslim di Indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf kurang lebih Rp. 1.000.000 per tahun. Realisasi penerimaan wakaf bisa kita ketahui asal laporan keuangan berbagai lembaga amal ataupun lembaga nadzhir pada Indonesia.



Sumber: data diolah

Ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi wakaf dengan realisasinya ini dapat disebabkan oleh beberapa hal (Aam S dkk., 2019) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 29.54% aspek kepercayaan menjadi prioritas masalah dalam berkembangnya wakaf tunai di Indonesia. Sebesar 27.92% merupakan aspek masalah syariah, SDM (Sumber Daya Manusia) sebesar 23,74% dan aspek system sebesar 18,14%. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa wakif (pemberi wakaf) belum percaya seutuhnya pada pengelola wakaf dalam memberikan harta tunai nya. Rendahnya kepercayaan diantaranya disebabkan oleh kinerja nazir (pengelola wakaf) yang rendah, kasus-kasus korupsi maupun penyelewengan masih terjadi serta masalah literasi wakaf (kurangnya edukasi) kepada para pemberi wakaf.

Aspek lainnya dikemukakan oleh Ahmad Muslich (2016) bahwa tantangan pengelolaan wakaf pada Indonesia yakni Pertama: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten serta lain-lain belum banyak dipahami menjadi bagian berasal yang dapat diwakafkan; kedua, Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih belum konvensional / tradisional ialah Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum bisa menjadikan wakaf secara produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf buat masjid, serta pendidikan. Sedangkan wakaf buat pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan; Ketiga: agama serta akuntabilitas pengelolaan mal wakaf belum maksimal , artinya kepercayaan warga terhadap nadzir belum maksimal . Sistem pelaporan secara berkala juga belum banyak dilakukan; Keempat: lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi hambatan tersendiri bagi Nadzir.

Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf antara lain kelengkapan administrasi, komunikasi menggunakan BPN, keterlibatan Kemenag. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag serta BPN juga menentukan dan masih banyak lagi; Kelima: kurangnya kerjasama dengan lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya pada tingkat kabupaten dan adanya Badan Wakaf Indonesia yg ad interim masih ada di sentra dan di propinsi menjadi tantangan kenapa lembaga wakaf pada tingkat kabupaten belum bisa berjalan secara optimal. (Hiyanti, Indria , & Fazriah, 2020)

**Pengelolaan Digitalisasi Wakaf Uang**

Wakaf uang ialah salah satu contoh penyerahan aset wakaf yang transformatif untuk mengoptimalkan penerimaan wakaf uang pada Indonesia.Perkembangan wakaf di Indonesia kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan objek harta wakaf, baik berupa tanah, uang serta lainnya, yang beredar di banyak sekali penjuru di Indonesia. (Dr. Amelia Fauzia, 2016) Saat ini, wakaf uang bisa dibayarkan melalui platform yang terintegrasi menggunakan sistem perbankan syariah digital (DSBS) seperti Jadiberkah.Id (Bank Syariah mandiri), Digital Wakaf Hasanah (Bank Negara Indonesia Syariah), dan layanan wakaf online lainnya yang disediakan oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Dagang Internasional Niaga, dan Bank rakyat Indonesia Syariah. (Izra Berakon, 2021)

Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup *(life style)* masyarakat menuntutlembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mudah 1,9 miliar Muslim di dunia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia. (IBTimes.ID, 2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002. Wakaf uang *(waqf al-nuqud)* dalam fatwa tersebut diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Fleksibilitas benda wakaf juga menjadi kunci utama dalam penghimpunan dana wakaf. Wakaf uang pada akhir-akhir ini menjadi tren untuk berwakaf dikarenakan lebih mudah dan fleksibel. BWI terus melakukan transformasi digital wakaf di Indonesia yang sigap terhadap tuntutan tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan *e-services* untuk para *nazhir* di Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran *nazhir*. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua dari tahapan proses transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional.

Pada peluncuran *e-services* tersebut, Ketua BWI Prof. Mohamad Nuh menegaskan komitmen BWI untuk mendorong penguatan transformasi digital sebagai bagian penting dari upaya optimalisasi potensi wakaf, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau berwakaf. Selain itu, dengan komposisi penduduk Indonesia yang 52 persennya adalah generasi milenial dan generasi Z, maka pilihan digitalisasi merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh BWI. Secara umum, ada tiga tahapan proses transformasi digital yang dilakukan BWI yaitu: Pertama, penguatan digitalisasi internal BWI. Hal ini ditandai dengan tiga indikator utama, yaitu peluncuran *platform berkahwakaf.id*, *platform* media sosial *sahabatbwi.com* dan layanan *e-services* untuk pendaftaran *nazhir*. Untuk dua *platform* awal, telah diluncurkan pada 10 April 2021 lalu, tiga hari menjelang puasa Ramadan 1442 H. Tujuannya adalah untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berwakaf, khususnya wakaf uang dan wakaf melalui uang, mendorong penguatan kampanye dan edukasi wakaf masyarakat, serta untuk meningkatkan layanan bagi para *nazhir* sehingga proses pendaftaran *nazhir* dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien, namun tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, yang dilakukan BWI adalah *nazhir* dan integrasi data wakaf. Dalam digitalisasi *nazhir* ini, yang menjadi fokus utamanya adalah memperkuat saluran digital *fundraising* wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mengembangkan sistim pelaporan yang kredibel dan *reliable* (dapat dipercaya). Terkait dengan saluran pengumpulan sdigital, akan didorong proses integrasi dengan *nazhir* lain. Apabila *nazhir* tersebut telah memiliki *platform* pengumpulan digital sendiri, maka akan didorong agar *platform* tersebut bisa terkoneksi dengan *platform* berkah wakaf yang telah dikembangkan BWI. Sebaliknya, apabila *nazhir* tersebut belum memiliki *platform* sendiri, maka dapat memanfaatkan pula *platform* berkah wakaf yang ada.

Terkait dengan hal ini, BWI perlu menyusun aturan dan mekanismenya sehingga integrasi data penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, aspek pelaporan adalah hal yang sangat krusial. Laporan yang kredibel akan memengaruhi kualitas database perwakafan yang ada. Harus diakui bahwa salah kelemahan fundamental dalam sistem perwakafan hari ini sangat terkait dengan ketersediaan data yang handal. Untuk itu, laporan yang disampaikan oleh para *nazhir* harus dapat dipastikan *valid,* terukur, tepat waktu dan terverifikasi dengan baik. Dengan digitalisasi yang dikembangkan BWI, diharapkan kecepatan, ketepatan, dan kehandalan laporan para *nazhir* dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Disinilah kualitas layanan *e-reporting* untuk *nazhir*, yang akan dikembangkan BWI, memegang peranan yang sangat penting.

Selain itu, integrasi data wakaf juga perlu dilakukan dengan sistem pendataan yang telah lebih dulu ada, khususnya Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan Kementerian Agama, maupun sistem yang ada di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Integrasi data SIWAK Kemenag dan sistem di BPN sangat penting, agar efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi wakaf tanah dapat ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan integrasi data wakaf uang yang terkumpul di LKSPWU yang dapat menghasilkan informasi yang bersifat *real time* dan *valid*. Dengan adanya integrasi ini, maka sejumlah resiko yang mungkin timbul dari kelemahan data yang ada, seperti resiko hukum dan resiko reputasi, dapat diminimalisir dengan baik.

Pada tahap ketiga, yang akan dilakukan adalah mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Pada tahap ini, seluruh pemangku kepentingan strategis (*strategic stakeholders*) perwakafan telah terkoneksi dengan baik. Inovasi model pengelolaan wakaf dapat terus dikembangkan, seperti diterbitkannya DES (Daftar Efek Syariah) khusus saham-saham syariah yang diwakafkan. Saat ini belum memungkinkan, tapi ke depan, siapa tau DES Wakaf ini bisa dikembangkan. Ini terjadi ketika kesadaran para investor untuk mewakafkan saham yang dimilikinya semakin besar. Dengan demikian, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah terus berupaya transformasi digital wakaf guna mengembangkan aplikasi untuk mendukung *waqf digital*. Kepercayaan publik diyakini akan semakin meningkat karena digitalisasi yang tepat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem wakaf. Untuk itu, pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam proses transformasi digital ini menjadi sangat penting dan strategis.

Kepercayaan inilah yang akan membuat realisasi penerimaan wakaf nasional akan semakin meningkat. Dan yang juga tidak boleh diabaikan, program pengelolaan aset wakaf beserta penyaluran manfaat kepada para *mauquf „alaih* harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Tujuannya agar publik semakin teryakinkan dan memiliki referensi yang kuat akan program-program yang dilakukan oleh para *nazhir*. Ketika publik melihat bahwa setiap rupiah yang diwakafkannya memberikan manfaat yang besar, baik dalam hal penurunan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan semakin termotivasi dan tergerak untuk berwakaf dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup (*life style*). Karena itulah, desain program wakaf, baik yang menggunakan pendekatan sosial maupun pendekatan komersial (wakaf produktif) perlu untuk dikembangkan secara inovatif, dengan tetap menjaga relevansinya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Rahmawati, 2021)

**Perkembangan Wakaf Uang di Luar Negeri**

* 1. Arab Saudi

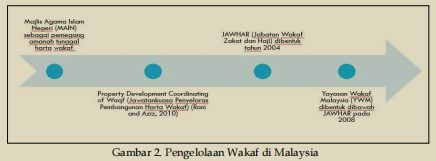
Arab Saudi menjadi Negara Islam konstitusional merupakan Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan global perwakafan. di tahun 1966 M Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani banyak sekali hal yang berafiliasi dengan wakaf, mirip membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, mendistribusikan yang akan terjadi wakaf kepada rakyat yang berhak serta memelihara kelanggengan aset-aset wakaf pada samping menyusun laporan lengkap dan rinci pada pihak kerajaan Saudi. pada antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol pada arab Saudi adalah pengelolaan wakaf spesifik bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan madinah. di atas tanah di lebih kurang Masjid Al-Haram di Mekah serta di atas tanaha yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-tempat tinggal penginapan buat dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan aneka macam asset yang dimiliki ke 2 kota tersebut. (Kamila, 2021)

* 1. Mesir

Di Mesir, menurut Sukron Kamil dalam pemanfaatan hasil wakaf diberikan untuk bidang dakwah Islam, diantaranya untuk para khotib, takmir masjid, para penghafal Al-Qur’an dan penerjemah Al-Qur’an. Bidang pendidikan dan layanan diantaranya untuk pendidikan yatim piatu dan beasiswa bagi sebagian mahasiswa Al Azhar, penghaji Islam, baik dalam maupun luar negeri. dalam bidang pendidikan, eksistensi Universitas Al Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. di bidang sosial, seperti bantuan ekonomi bagi yang tidak mampu dan bantuan kesehatan dan juga bidang penyebaran budaya Islam seperti penerbitan buletin Islam, percetakan buku-buku dan ensiklopedia Islam serta naskah kuno Islam. (Muslich, 2016)

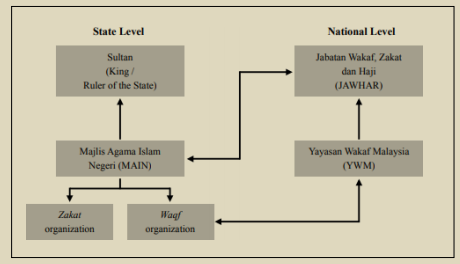
* 1. Malaysia

Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majlis agama Islam Negeri (MAIN) menjadi pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu ialah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama serta rumah anak yatim. dalam perjalanannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengarah Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf) untuk membantu MAIN dengan melibatkan pejabat berasal instansi swasta serta pemerintah yang memiliki keahlian serta pengalaman di bidangnya masing masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional



Gambar: Pengelolaan Wakaf Di Malaysia

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) pada tahun 2004. JAWHAR bertugas dalam membantu MAIN pada administrasi wakaf. di tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf dibawah JAWHAR yaitu Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang bertugas membantu MAIN pada mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf di sektor sektor yang komersil menjadi bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan.



Secara kelembagaan pengelolaan wakaf pada Malaysia diamanahkan kepada MAIN pada setiap negara negara bagian dan bertanggungjawab kepada sultan. untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, MAIN di setiap negara bagian berkoordinasi menggunakan JAWHAR. Dibawah kendali JAWHAR ada YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal agama). Wakil Dewan Pengawas merupakan ketua Pengarah JAWHAR. Anggota lainnya ialah perwakilan dari Majlis agama Islam Negeri masing masing negara bagian, perwakilan berasal Kementerian Keuangan dan akademisi. Pengelolaan wakaf di negara bagian yang terdapat di Malaysia memiliki corak yang beragam. Beberapa negara bagian ada yang menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN menjadi forum yg mempunyai otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya.

pada beberapa negara bagian, ada yang sudah menghasilkan lembaga khusus di bawah MAIN untuk alokasi wakaf. di Selangor terdapat Perbadanan Wakaf Selangor yang dibentuk tahun 2009. Tujuannya ialah supaya wakaf juga berkembang seperti halnya zakat. Selain daripada itu di Negeri Sembilan ada Perbadangan Wakaf Negeri Sembilan. di Sabah dan Kedah pengelolaan wakaf berada dibawah Baitulmal Negeri Sabah dan Tabung Baitul mal Kedah. Selain daripada itu, pengelolaan wakaf masih berada dibawah pengawasan Majlis agama Islam Negeri seperti di Johor dan Kelantan. Peruntukan dana wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah dan pesantren. ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktifitas ekonomi semacam toko dan ruko, dan pengembangan sektor pertanian semisal lahan perkebunan, pertanian serta bendungan. Terakhir merupakan untuk sektor keagamaan atau spiritual seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid dan pembelian lahan untuk kuburan.

Tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf. Pertama, regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi seluruh permasalahan wakaf, contohnya Bila ada konflik tentang agama atau syariah, justru Pengadilan Sipil mempunyai otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah, sehingga banyak perseteruan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil. kedua, kesadaran sosial yang dimaksud ialah pemahaman tentang wakaf. karena masih terdapat masalah perkara yang berkaitan menggunakan wakaf, mirip penjualan lahan wakaf sang anak anak asal wakif selesainya orang tua mereka mati (orang yang mewakafkan hartanya). Ketiga ialah perbedaan administrasi, yaitu bahwa MAIN artinya pemegang amanah tunggal lahan wakaf. kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR. Proyek pengembangan lahan wakaf wajib mendapatkan izin dari MAIN dan JAWHAR. Selain JAWHAR bertindak menjadi coordinator, ia pula bertindak seperti perantara antara MAIN dengan pihak yang ingin berbagi lahan wakaf. Terakhir ialah komersialiasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan dimana sejarah wakaf pada masa kemudian mempu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan serta pelayanan publik lainnya.

* 1. Turki

Pada sejarah Turki Utsmani, wakaf ialah kategori fiskal ketiga pada perekonomian selesainya system pembendaharaan negara dan system timar yaitu pajak pendapatan berasal lahan yang kebanyakan dari lahan pertanian. Turki Usmani telah sukses menciptakan negaranya menggunakan berlandaskan wakaf. lembaga wakaf berhasil membagikan signifikansinya dalam menciptakan perekonomian menggunakan menyediakan barang publik buat memberikan layanan layanan sosial. Setidaknya terdapat lima sektor yang dibangun melalui wakaf, yaitu pertama ialah sektor infrastrukur seperti jembatan, trotoar, saluran air, serta jalan. ke 2 merupakan sektor pendidikan antara lain ialah universitas, perpustakaan, serta kompleks bangunan yang terdiri berasal masjid menjadi pusatnya serta dikelilingi oleh lembaga pendidikan, tempat tinggal sakit, dapur awam, pemandian, serta layanan sosial lainnya. Ketiga merupakan sektor kesehatan. Keempat merupakan sektor keagamaan seperti masjid, mushalla, serta pondok. Kelima artinya sektor ekonomi mirip penginapan serta bazar setelah kejayaan Turki Usmani runtuh, yaitu di tahun 1926 rezim republik sekular Turki pernah mengubah nama wakaf menggunakan nama “Ta’sis”.

Pengubahan nama “wakaf” selama 41 tahun (1926-1967) berdampak pada merosotnya minat masyarakat beramal. Tercatat hanya 73 wakaf baru didirikan antara 1923-1967 (Babacan, 2014). Nama wakaf dikembalikan dalam UU sipil di 13 Juli 1967. Pengembalian nama wakaf ini pribadi menarik masyarakat balik berwakaf. Setidaknya pada rentang saat 10 tahun semenjak dikembalikannya nama “Wakaf” (1967-1977) jumlah pewakaf jauh melampaui periode nama “Ta’sis” selama 41 tahun. Wakaf di Turki pada masa sekarang ialah dikelola oleh Direktorat Jendral Wakaf serta dikelola oleh forum wakaf serta mutawalli yang mampu berbentuk forum pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Direktorat Jendral Wakaf bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan serta Pariwisata dalam mengelola wakaf untuk museum, serta bangunan dan benda kebudayaan.

Direktorat Jendral Wakaf bersama Kementerian Kebudayaan serta Pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu pelayanan sosial, investasi dan perawatan kekayaan budaya. Pertama, fungsi pelayanan sosial terdiri berasal pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tunjangan untuk rakyat miskin, serta beasiswa pendidikan. kedua, fungsi investasi ditujukan untuk pembangunan tempat tinggal susun berbasis lahan (flat for landbased construction). Sejak tahun 2003, metode ini sudah mengevaluasi 519 lahan menjadi tempat tinggal, toko, tempat kerja, vila, apartemen serta sekolah swasta. Selain itu juga memiliki fungsi restorasi atau pemulihan melalui model conditional leasing on restoration. Dari tahun 2003, melalui model ini beberapa lahan telah dinilai menjadi pusat perdagangan, perkantoran, hotal, stasiun pengisian bahan bakar, apartemen, tempat tinggal sakit, sekolah swasta, asrama mahasiswa, tempat tinggal , daerah industry, dan beragam fasilitas seperti olah raga, pariwisata, komersial, pendidikan, serta fasilitas kesehatan.

Selanjutnya merupakan fungsi rekonstruksi melalui conditional leasing on reconstruction, dimana Sejak tahun 2003 melalui contoh ini beberapalahan dievaluasi menjadi hotel, tempat kerja, penginapan, perpustakan, pabrik, madrasah, serta aneka macam fasilitas seperti kesehatan berbasis kebudayaan, pariwisata berbasiskebudayaan, pendidikan berbasis pariwisata, dan fasilitas kebudayaan berbasis komersil. Ketiga merupakan fungsi perawatan kekayaan budaya mirip museum, bangunan budaya serta benda budaya. (Rakhmat & Beik, 2022)

**Tren Perkembangan Dunia Filantropi Dan Pengelolaan Dana Sosial**

* + - * 1. Tren Perkembangan Dunia Filantropi

Sejarah Filantropi di Indonesia Istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan anthropos (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (service) dan asosiasi (association) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (voluntary action for the public goods). Dalam Islam, kata filantropi merupakan istilah baru yang tidak dikenal di awal penyebaran agama Islam. Namun saat ini bermunculan padanan kata dalam bahasa Arab untuk kata “filantropi” tersebut, seperti al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian sosial), al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan), ‘ata khayri (pemberian untuk kebaikan), al-birr (perbuatan baik) serta sadaqah (sedekah).

Filantropi Islam tumbuh di Indonesia seiring dengan kehadiran Islam. Praktek ini lebih mudah diterima oleh masyarakat nusantara karena bentuk-bentuk amal sudah menjadi tradisi mereka, terutama amal yang berakar pada ajaran agama. Misalnya saja dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi jimpitan, yaitu praktik kedermawanan yang dilakukan perempuan dengan menyumbangkan nasi untuk kegiatan sosial bagi lingkungan atau masyarakat yang menghadapi bencana alam. Tradisi serupa juga terdapat pada masyarakat Sunda dengan nama lain yaitu Perelek. Selain jimpitan, masyarakat Jawa juga mengenal tradisi maleman, megengan dan kupatan, yaitu tradisi menukarkan atau mengirimkan makanan kepada sanak saudara, teman dekat dan terutama masyarakat miskin di lingkungan sekitar yang dilakukan setiap menjelang bulan puasa, menjelang hari raya Idul Fitri dan setelah Idul Fitri.

Sementara itu, masyarakat Toraja menganut tradisi bua bungaran, yaitu menyumbangkan hasil panen pertama tanaman atau ternak ke desa atau organisasi sosial. Tradisi serupa juga dilakukan masyarakat Dayak. Sedangkan masyarakat Bali mengenal dan mengamalkan tradisi Truyen dalam kehidupan sehari-hari. Ngayah bagi masyarakat Bali merupakan aksi kolektif yang tulus dan altruistik yang melayani kepentingan masyarakat dan agama di Bali. Tradisi-tradisi tersebut masih mengakar dan diamalkan di berbagai daerah di Indonesia. Melaksanakan kegiatan amal juga merupakan bagian dari ajaran dan kegiatan agama di Indonesia. Misalnya saja dalam agama Islam yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia, konsep dan praktik zakat terdapat dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, sponsorship, dan bentuk donasi lainnya.

Dalam perkembangan filantropi di Indonesia, setidaknya terdapat 3 kategorisasi dari berbagai bentuk kegiatan filantropi:

1. Bentuk pertama adalah kegiatan amal tradisional, yaitu kegiatan amal yang berdasarkan tradisi dan ajaran agama masyarakat Indonesia.
2. Bentuk kedua meliputi kegiatan amal yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks Indonesia, kemunculan organisasi masyarakat sipil di bidang amal keagamaan setidaknya dipicu oleh munculnya krisis ekonomi dan krisis politik.
3. Bentuk ketiga melibatkan organisasi sumber daya masyarakat sipil. Organisasi ini adalah organisasi pelatihan komunitas nirlaba, non-pemerintah, yang dikelola dan dioperasikan secara lokal.

Pertumbuhan filantropi pada tahun 1990-an juga ditandai dengan munculnya aktor-aktor baru yang berkontribusi dan mendorong perkembangan filantropi. Salah satunya adalah media. Media massa muncul sebagai organisasi yang efektif untuk memobilisasi kepentingan dan kemurahan hati masyarakat dan televisi, radio dan surat kabar tidak lagi berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, dan mulai memperluas cakupan kegiatannya dan “peduli ”. (Aiz , 2020)

**Peran Lembaga Filantropi di Bidang Wakaf**

1. Sumur Wakaf

Sumur Wakaf merupakan program pengelolaan dana wakaf untuk membangun sumur yang menyediakan air minum bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sumur wakaf dibangun di wilayah yang mengalami krisis air minum dan kekeringan. Pembangunan sumur wakaf ACT juga sudah merambah ke luar negeri, seperti di Gaza, Palestina.

1. Warung Wakaf

Warung wakaf yaitu inovasi usaha warung modern berbasis dana wakaf yang dibangun untuk kebutuhan ibadah dan pendidikan yang membutuhkan. Sekitar 70% hasil usaha digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

1. Lumbung Pangan

Wakaf Lumbung Pangan Wakaf merupakan sentra pertanian pangan dengan memberdayakan masyarakat lokal. Lumbung Pangan Wakaf berupa persawahan dan perkebunan terbesar dan luas di Jawa Tengah dan wilayah lainya.

1. Lumbung Ternak Wakaf

Pusat pertenakan kambing dan sapi berbasis wakaf, dikelola oleh masyarakat lokal untuk peningkatan kesejahteraan. Lumbung Ternak Wakaf terbesar di daerah Tasikmalaya, Blora, Yogyakarta, hingga Nusa Tenggara Barat.

1. Perahu Wakaf

Program pengelolaan dana wakaf dalam bentuk penyediaan perahu beserta kelengkapannya untuk menopang kehidupan para nelayan korban bencana atau wilayah yang membutuhkan lainnya. (Solikhah, Azam, Bestari, Huda, & Yunita, 2021)

**Pengelolaan Dana Sosial/Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia**

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan satuan yang lebih kecil.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. (Suryadi & Arie Yusnely, 2019). Pengelolaan wakaf tunai/ uang di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu wakaf tunai dikelola Bank Syariah dan Lembaga Swasta.

1. Wakaf Tunai Dikelola Bank Syariah.

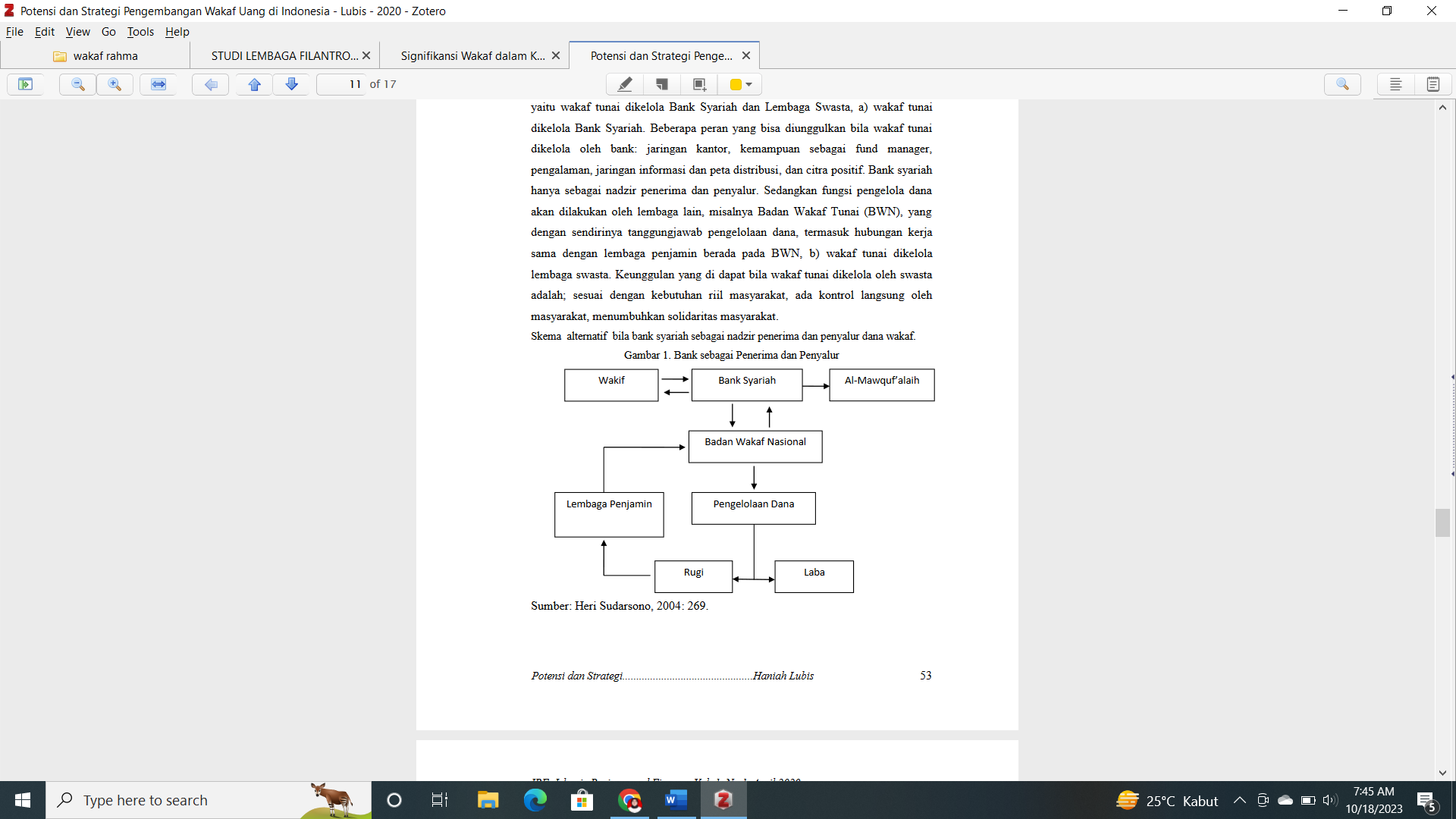
Beberapa peran yang bisa diunggulkan bila wakaf tunai dikelola oleh bank: jaringan kantor, kemampuan sebagai fund manager, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, dan citra positif. Bank syariah hanya sebagai nadzir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Tunai (BWN), yang dengan sendirinya tanggungjawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerja sama dengan lembaga penjamin berada pada BWN

1. Wakaf Tunai Dikelola Lembaga Swasta.

Keunggulan yang di dapat bila wakaf tunai dikelola oleh swasta adalah; sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, ada kontrol langsung oleh masyarakat, menumbuhkan solidaritas masyarakat.

Skema alternatif bila bank syariah sebagai nadzir penerima dan penyalur dana wakaf.

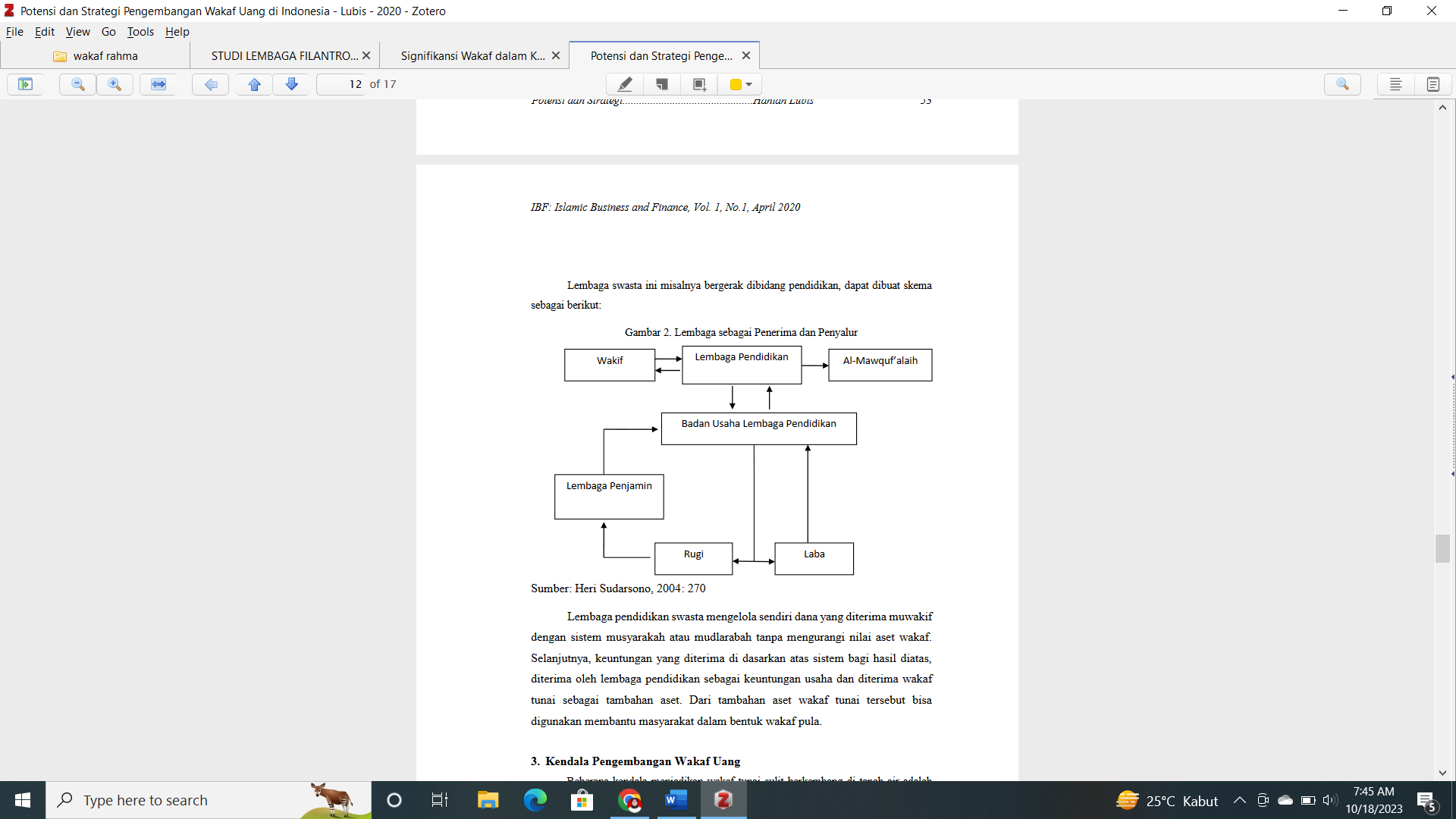
Gambar: Bank Sebagai Penerima dan Penyalur



Sumber: (Lubis, 2020)

Lembaga swasta ini misalnya bergerak dibidang pendidikan, dapat dibuat skema sebagai berikut:

Gambar: Lembaga sebagai Penerima dan Penyalur



Sumber: (Lubis, 2020)

Lembaga pendidikan swasta mengelola sendiri dana yang diterima muwakif dengan sistem musyarakah atau mudlarabah tanpa mengurangi nilai aset wakaf. Selanjutnya, keuntungan yang diterima di dasarkan atas sistem bagi hasil diatas, diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari tambahan aset wakaf tunai tersebut bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf pula.(Lubis, 2020)

**Pendistribusian Dana Hasil Wakaf Uang**

Pendistribusian hasil wakaf tunai harus memperhatikan tujuannya, yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, maupun investasi infrastruktur. Hasil yang diperoleh tersebut juga sebagian porsi tertentu perlu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf tunai, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai awal wakaf tunai dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut. Pemilihan tujuan distribusi hasil wakaf tergantung atas ketersediaan atau besar kecilnya hasil yang dapat diperoleh dalam pengelolaan dana wakaf tunai.

**Kendala Serta Solusi Pengembangan Wakaf Uang Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang

Masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa wakaf berupa harta tetap atau tidak habis gunakan. Hal ini menjadi kendala pengenalan hukum wakaf tunai khususnya pada perdesaan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah bahwa pihak BWI bersama pihak terkait dalam hal ini adalah LKS-PWU maupun nazhir wajib terus menyosialisasikan aturan wakaf tunai serta fungsinya di masyarakat.

* + - * 1. Kurang profesionalnya nazhir dalam pengelolaan wakaf uang

Solusi untuk mengatasi hambatan terkait kelemahan nazhir ialah peningkatan kualitas nazhir. Nazhir tidak hanya harus memahami dan menghayati pengetahuan agama dan kebijakan negara untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak boleh kepercayaan serta Negara. Kurangnya kemampuan praktisi wakaf dalam pengembangan wakaf uang

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut merupakan bahwa seluruh praktisi wakaf harus membekali diri dengan pengetahuan mengenai wakaf uang. (Sulistyani, Asikin, Soegianto, & Sadono, 2020)

**Karakteristik Sasaran Wakaf Uang Melalui Digitalisasi**

Generasi milenial menunjukkan karakteristik unik berdasarkan kondisi regional dan sosial ekonomi. Salah satu karakteristik utama generasi Milenial adalah meningkatnya penggunaan dan keakraban mereka dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibina oleh kemajuan teknologi, Generasi Z bercirikan kreatif, informatif, bersemangat, dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih bersahabat dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang memanfaatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan.Bukti nyata yang dapat diamati adalah sebagian besar generasi ini memilih menggunakan ponsel pintar.Dengan menggunakan perangkat tersebut, generasi Milenial dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien.

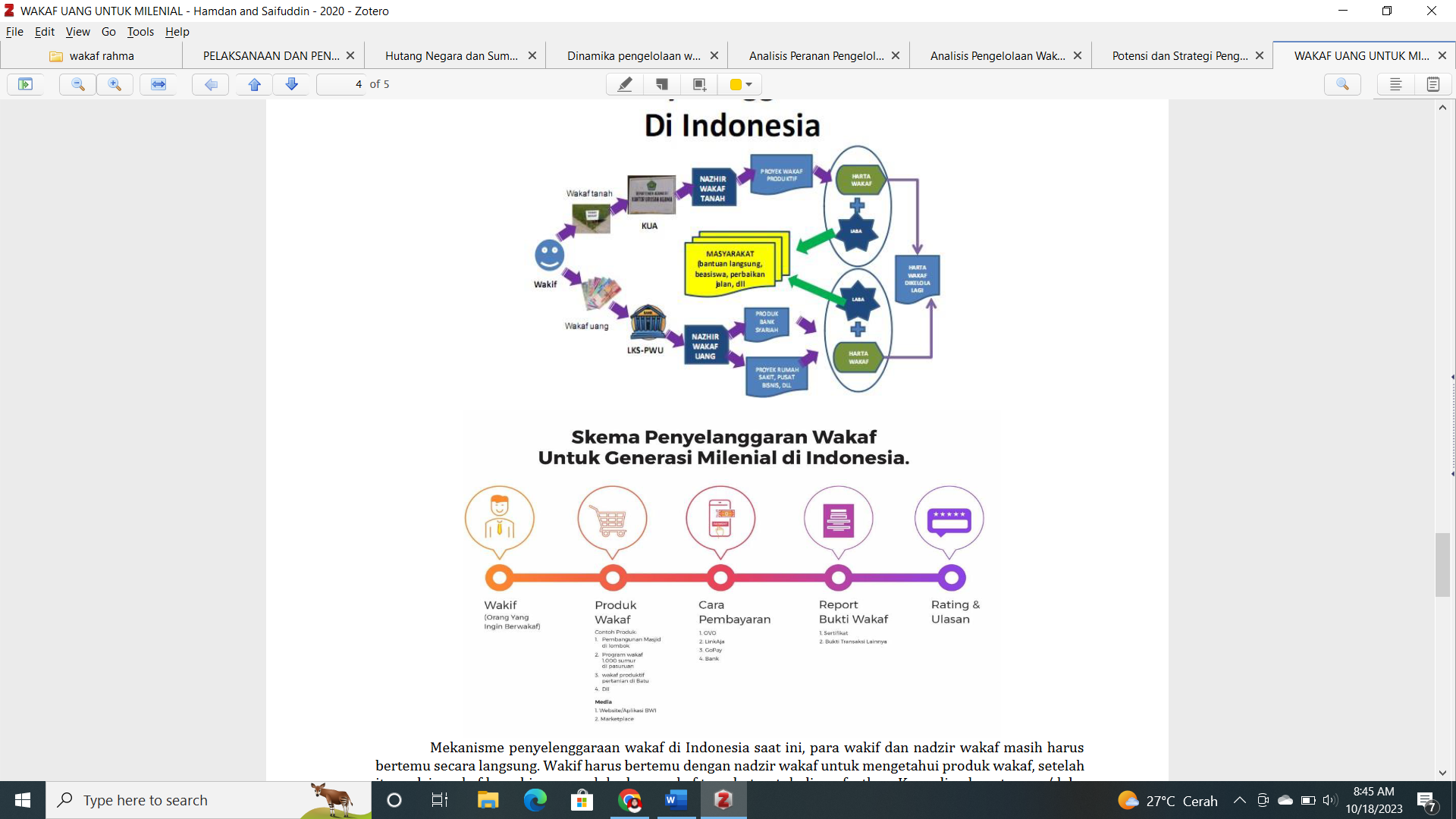
Dari perangkat tersebut, mereka dapat melakukan segalanya: mengirim pesan singkat, mengunjungi website pendidikan, melakukan transaksi komersial online, atau memesan layanan transportasi online. Oleh karena itu, mereka dapat menciptakan banyak peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Generasi ini bercirikan komunikasi yang terbuka, keranjingan menggunakan jejaring sosial, dan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Minat membaca santai kini menurun karena generasi milenial lebih memilih membaca melalui ponsel pintar. Generasi milenial sepertinya wajib memiliki akun media sosial sebagai alat komunikasi dan pusat informasi. Generasi milenial pastinya lebih memilih ponsel dibandingkan televisi. Menonton acara TV bukan lagi sebuah hiburan karena mereka bisa menemukan segala sesuatunya melalui smartphone. Generasi Milenial bisa dikatakan mempunyai banyak peluang dan peluang untuk berinovasi.

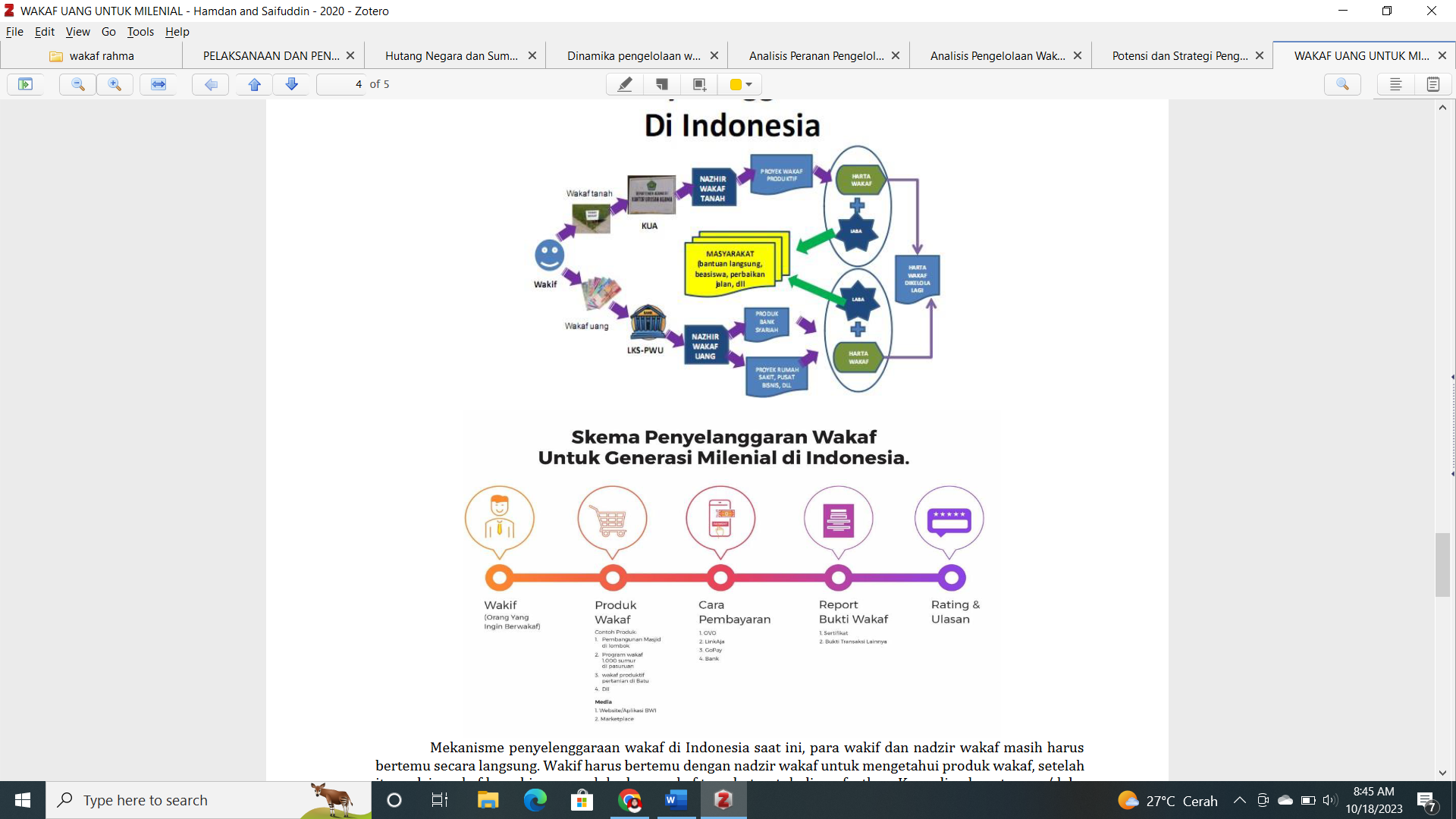
Digitalisasi generasi Milenial telah berhasil mengembangkan banyak sektor bisnis yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya bisnis online, baik di sektor komersial maupun transportasi. Mereka berhasil memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sementara itu, kehadiran perusahaan e-commerce yang didirikan oleh generasi muda Indonesia dapat memfasilitasi jiwa wirausaha generasi muda untuk berkembang lebih jauh.

Berbagai contoh inovasi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu mencapai kemandirian ekonomi. Saat ini, sebagian besar anak muda memiliki ponsel pintar. Kehidupan mereka seolah tidak bisa dipisahkan dari dunia digital. Smartphone tidak lagi sekedar alat komunikasi tetapi juga digunakan untuk tujuan sosial, profesional, dan pendidikan. Tren yang jelas di kalangan generasi milenial adalah melakukan transaksi non-tunai dan menggunakan aplikasi pembayaran serta koin mata uang kripto sebagai sarana bertransaksi. Alokasi sebesar 5,3% dari penghasilan mereka menjadi peluang salah satunya untuk bisa berwakaf melalui media online. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem pengelolaan wakaf yang sesuai dengan karakteristik generasi Z. Begitulah skema pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia saat ini.

* Skema Penyelenggaraan Wakaf Di Indonesia



* Skema Penyelenggaraan Wakaf Untuk Generasi Milneial Di Indonesia



Mekanisme tata kelola wakaf di Indonesia yang berlaku saat ini berarti wakif dan nadzir wakaf harus selalu bertemu secara langsung. Waqif harus menemui nadzir wakaf untuk menanyakan produk wakaf, kemudian nadzir wakaf dapat mengelola uang wakaf yang akan digunakan. Keuntungannya kemudian dapat dibagikan kepada masyarakat dan harta wakaf dapat dikelola kembali, dan sebagainya. Mekanisme pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini dinilai kurang efektif jika diterapkan pada generasi Milenial.Menurut NCF (2013), sekitar 75% generasi milenial merupakan generasi yang paham teknologi (technology expert). Menurut studi yang dilakukan NCF, 80% generasi muda bahkan tidur dengan ponsel di samping tempat tidurnya.

Penelitian ini mendukung fakta bahwa hubungan yang terbentuk antara generasi Milenial dan teknologi telah menggantikan bentuk hubungan Milenial lainnya. Misalnya saja hubungan milenial dengan buku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang sesuai dengan karakteristik generasi Millenial, berikut program pelanggaran wakaf yang ditujukan kepada Millenial di Indonesia. Untuk penyelenggaraan wakaf bagi generasi milenial di Indonesia mekanismenya semakin sederhana, wakif dan nadzir wakaf tidak perlu bertatap muka. Generasi milenial dalam hal ini para wakif bisa langsung melakukan wakafnya hanya dengan menggunakan smartphone yang dimilikinya. Mereka tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi wakaf. Teknik ini hampir sama dengan pembayaran non tunai lainnya. Wakif dapat mengakses langsung produk wakaf melalui dua cara, pertama melalui website/aplikasi yang disiapkan Dewan Wakaf Indonesia. Kedua, Anda bisa melalui pasar. Pembayaran produk wakaf ini dapat dilakukan melalui OVO, LinkAja, GoPay atau Mobile Banking.

Mereka kemudian menerima laporan sebagai bukti wakaf dalam bentuk sertifikat elektronik atau bukti transaksi lainnya. Setiap wakif dapat memberikan rating dan review terhadap produk pilihannya, hal ini penting untuk kemajuan produk badan wakaf Indonesia di masa depan. Untuk meningkatkan wakaf di Indonesia, BWI harus berkolaborasi dengan generasi milenial untuk berperan aktif, mulai dari keikutsertaan mereka dalam beberapa kegiatan BWI hingga konten dan informasi yang disampaikan harus relevan dengan tujuannya agar tidak terkesan terlalu forma seperti Instagram atau Facebook. Kita tahu bahwa tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbeda dengan sedekah, pahala wakaf jauh lebih besar karena manfaatnya dirasakan banyak orang dan bersifat permanen. Pahala wakaf akan tetap mengalir meski yang wakif meninggal dunia. Untuk itu generasi milenial harus dibiasakan dengan wakaf, dididik dan dimotivasi untuk memulai wakaf sejak usia muda. (Hamdan & Saifuddin, 2020)

**Dampak Wakaf Pada Keuangan**

Salah satu alternatif sumber pembiayaan negara adalah wakaf. Wakaf merupakan sumber keuangan publik yang dimiliki oleh masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, beban pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi menjadi lebih ringan dan relatif mudah.Sebagai instrumen keuangan publik, wakaf dapat digunakan dalam berbagai cara yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena hukum Islam tidak mengatur penggunaan wakaf secara rinci, seperti zakat yang hanya dapat diklasifikasikan koordinatnya untuk delapan asnaf. Potensi harta wakaf di kalangan umat Islam sungguh sangat besar, apalagi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk umat Islam yang sangat besar.

Potensi tersebut jika dikelola dengan pengelolaan tradisional tentu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan perekonomian umat Islam dan negaranya. Salah satu bentuk perbaikan pengelolaan harta wakaf adalah dengan menerbitkan undang-undang wakaf. Dengan adanya undang-undang ini, status hukum harta wakaf menjadi jelas. Semakin jelas pula siapa yang berwenang mengelola dan mengawasi seluruh harta wakaf di Indonesia, itulah sebabnya Dewan Wakaf Indonesia dibentuk. (Rafsanjani, 2020) Kehadiran BWI bertujuan untuk mendorong para nazhir dalam mengelola harta wakaf agar lebih baik dan lebih efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, berupa pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut data Kementerian Agama, luas tanah wakaf di Indonesia saat ini adalah 51.251,35 hektar, dimana 61,13% dari luas tanah wakaf tersebut telah tersertifikasi dengan rincian sebagai berikut (Fathoni, 2019):

* 28,41 persen dalam bentuk rumah ibadah/Musholla
* 36 persen dalam bentuk rumah ibadah/Masjid
* 4,45 persen berupa makam
* 3 persen berbentuk sarana pendidikan/Sekolah
* 3,48 persen dalam bentuk Pesantren
* 8,61 persen dalam bentuk Sosial lainnya

Wilayah yang luas ini jika dikelola dengan baik tentu akan memberikan hasil yang besar dan membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, kini terdapat inovasi dalam pembayaran wakaf, berupa wakaf uang. Wakaf ini menggunakan benda wakaf sebagai uang, oleh karena itu sering disebut wakaf uang.

Bank Indonesia mendukung pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia dengan memberikan ruang wakaf (fleksibel) di era globalisasi saat ini. Saat ini, menurut IBB, uang tunai berpotensi mencapai Rp 188.000 miliar per tahun.

Melalui Wakaf Tunai, peluang investasi unik dapat diciptakan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan pelayanan sosial. Wakaf juga dapat dijadikan sumber penerimaan negara bukan pajak, potensinya lebih besar dibandingkan potensi pajak. Sebagai instrumen keuangan syariah, pengelolaan wakaf harus konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan Islam melalui Al-Quran dan hadis atau dikenal dengan maqashid syariah. Pengelolaan wakaf yang baik dapat mendorong peran wakaf sebagai instrumen pembangunan negara. (Adinta & Nur, 2020)

**Model Pengembangan**

Terdapat berbagai model untuk mengembangkan dan mengelola uang wakaf, antara lain:

1. Model pendidikan: Model ini melibatkan penggunaan uang wakaf untuk mendanai lembaga pendidikan, misalnya universitas atau sekolah menengah atas. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan gedung, beasiswa, dan penelitian. (Napitupulu, Lubis, & Nasution, 2021)
2. Model UKM: Model ini melibatkan penggunaan hibah tunai untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UKM) di industri halal. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Rohim, 2021)
3. Model Investasi: Model ini melibatkan investasi sebagian dana tunai pada berbagai instrumen keuangan, seperti produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Keuntungan dari investasi ini kemudian dapat didistribusikan ke berbagai penerima manfaat, seperti masyarakat miskin atau program pengembangan masyarakat. (Sudirman & Zainab, 2023)

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian ini, kita dapat menghitung bahwa Wakaf Uang adalah salah satu potensi ekonomi yang sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung program sosial dan ekonomi halal. Menurut penelitian ini, ada beberapa hal yang diperlukan untuk mengembangkan model sistem Wakaf Uang. Ini termasuk membangun strategi untuk mengelola dana wakaf, mengoptimalkan sistem penyaluran, meningkatkan keterampilan tenaga ahli dan penyelenggara wakaf, dan mengembangkan model pengembagan di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, UKM, dan investasi. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif tentang praktik pengelolaan wakaf uang di negara lain. Ini dilakukan untuk tujuan menjadi model untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia dan negara islam lainnya.

Untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, perlu dilakukan tindakan yang mencakup peningkatan kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan dana wakaf serta pembuatan model sistem yang memungkinkan

**Daftar Pustaka**

AbdullahJunaidi. (2017). Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 89-90.

AdintaHusnaAnisa, & NurRizky TaufiqMuhammad. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 30.

Aiz Muhammad. (2020). Studi Lembaga Filantropi Media Masa. Misykat, 176.

Al ArifRiantoM Nur. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. Jurnal Asy- Syir'ah Fak.Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13.

Dr. Amelia FauziaAl Muin, M.A, Tati Rohayati, Endi Auliya GaradianNani. (2016). Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Hamdan Ali, & Saifuddin. (2020). Wakaf Uang Untuk Milenial. ICO EDUSHA International Conference on Education Management and Sharia Economics, 15.

HiyantiHida, Indria FitriAfiyana, & FazriahSiti. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 81.

IBTimes.ID. (2020 Oktober,Sabtu) : data populasi pensususk muslin terbesar di Indonesia: https;//ibtimes.id/data-populasi penduduk muslim terbesar di dunia

Izra BerakonMustiko Aji, Muhammad Riza HafiziHendy. (2021). Impact of Digital Sharia Banking Systems On Cash-Waqf Among Indonesian Muslim Youth. JIMA.

KamilaZahraMaulida. (2021). Hukum Keluarga Di Saudi Arabia. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 143-144.

Lubis Idham KholidMuhammad, Mustamam, & Akhyar Adil. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 145-146.

LubisHaniah. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. IBF: Islamic Business and Finance, 48.

MuslichAhmad. (2016). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. Muaddib, 210.

NapitupuluMonitorirRodame, LubisRukiah, & NasutionHapissudin. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

RafsanjaniHaqiqi. (2020). Hutang Negara Dan Sumber Altermatif Keuangan Negara Perspektif Islam. Jurnal Studi Hukum Islam, 3.

RahmawatiThamrin, Satriak Guntoro & Sri KurnialisHusni. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. Jurnal Tabarru : Islamic Banking and Finance, 537-540.

RakhmatSyarifeurAdriana, & BeikSyauqiIrfan. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 50-54.

RohimNurAde. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2.

SolikhahAalfiatusNurul, AzamAzimaShelna, BestariAyuDindha, HudaKhoirulMoh, & YunitaRatna. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 36.

Sudirman, & Zainab. (2023). Progresivitas Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uiang Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah.

SulistyaniDiah, AsikinNur, SoegiantoSoegianto, & SadonoBambang. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. USM Law Riview, 337-339.

SuryadiNanda, & Arie Yusnely. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 32.